
Research Article

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Silvia*, Hyronimus Rowa, Ahmad Averus

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Article history:

Submission May 2025

Revised May 2025

Accepted May 2025

*Corresponding author:

E-mail:

vivisilvia920@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam penanganan stunting, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto, yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 19 informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan tergolong cukup baik, terutama dalam aspek kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat kelemahan dalam produktivitas dan responsibilitas, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi, kewenangan yang jelas, pemenuhan kebutuhan gizi, serta keterlibatan lintas sektor. Sebaliknya, hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, kemiskinan, serta buruknya sanitasi dan lingkungan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai langkah, seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan sosialisasi ke masyarakat, dan penguatan kerja sama antarinstansi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Pensiun

Pendahuluan

Pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Hal ini telah menjadi bagian dari tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai

masyarakat yang sehat dan sejahtera, pembangunan kesehatan menjadi aspek krusial, termasuk dalam penanganan masalah gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia, salah satunya adalah stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan

How to cite:

Silvia, Rowa, H., & Averus, A. (2025). Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 5(1), 97 – 105. doi: 10.11594/jesi.05.01.11

gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar usia. Dampaknya tidak hanya berupa gangguan fisik dan pertumbuhan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas hidup anak di masa depan. Dalam jangka panjang, stunting berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah prioritas, memiliki angka prevalensi stunting sebesar 20,2 persen pada tahun 2022. Meskipun menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas target nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya stunting di wilayah ini antara lain tingginya angka kemiskinan, pencemaran lingkungan, buruknya akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola asuh anak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berperan sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai program dan kebijakan. Strategi yang dilakukan meliputi intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi kesehatan, peningkatan pelayanan puskesmas, serta kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan sosial budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam penanganan stunting, mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program, serta mengkaji upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan program yang telah berjalan dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kinerja instansi

daerah dalam menanggulangi permasalahan stunting dan mendukung pencapaian target nasional yang telah ditetapkan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Normaisa dkk (2020) di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat melibatkan pendekatan organisasi secara menyeluruh, baik dari segi penyusunan misi, pelibatan masyarakat melalui program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan GEM-PITA (Gerakan Masyarakat Peduli Stunting), serta penguatan sumber daya internal. Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan partisipasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menekan angka stunting. Penelitian Fitriani Pramita Gurning (2020) di Kota Medan menekankan pentingnya dukungan multisektor dalam mengimplementasikan program stunting, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, media informasi, dan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Studi ini juga menyoroti bahwa kompleksitas faktor penyebab stunting membutuhkan pendekatan interdisipliner dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

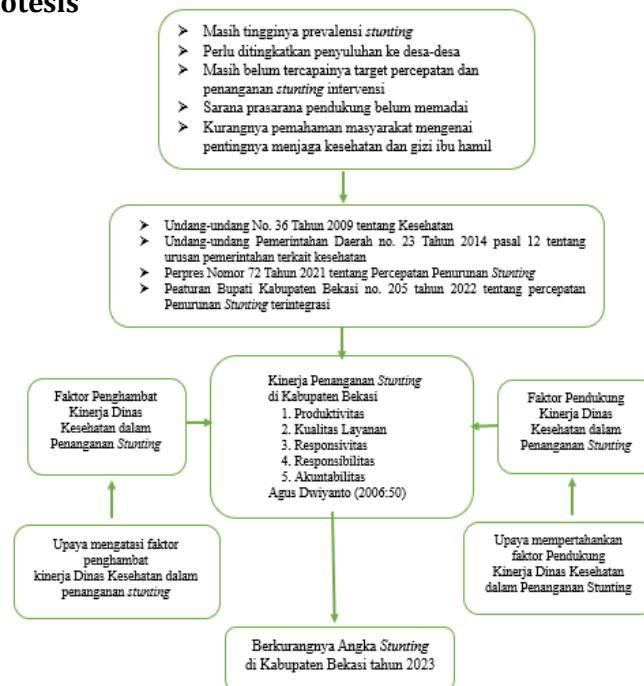
Penelitian Fatris Rudmini (2021) di Kabupaten Simeulue memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya dana, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi penanggulangan stunting, meskipun Dinas Kesehatan telah berupaya memberikan pelatihan dan edukasi bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF. Rina Tri Puji (2021) di Kabupaten Magelang menggarisbawahi pentingnya perumusan kebijakan strategis yang didasarkan pada analisis kebutuhan lokal dan data yang akurat, untuk mendorong penurunan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, Ni Made Rista Rahmandari (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dapat berperan optimal dalam mewujudkan daerah bebas stunting melalui promosi kesehatan, edukasi tentang gizi seimbang, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dinas pendidikan dan organisasi masyarakat.

Dari seluruh penelitian tersebut, terlihat bahwa faktor kinerja organisasi, kolaborasi antarinstansi, sumber daya yang memadai, serta tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan prevalensi stunting. Namun, sebagian besar studi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek strategi atau program, dan belum banyak yang secara spesifik menilai kinerja organisasi publik berdasarkan indikator yang terukur secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara khusus kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam menangani stunting, menggunakan teori kinerja organisasi publik

dari Agus Dwiyanto. Teori ini memuat lima dimensi utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan, dukungan, dan efektivitas kelembagaan dalam konteks lokal yang spesifik. Dengan demikian, kajian pustaka ini memberikan pijakan yang kuat untuk menganalisis fokus penelitian secara mendalam, serta menunjukkan kontribusi orisinal dari studi ini terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan manajemen pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Permasalahan stunting dianggap sebagai isu strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga penanganannya membutuhkan kinerja instansi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori kinerja publik dari Agus Dwiyanto sebagai acuan utama, yang mengusulkan lima dimensi penting dalam menilai kinerja organisasi sektor publik, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Produktivitas dilihat dari seberapa besar capaian program dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Kualitas layanan mencerminkan seberapa baik pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Responsivitas menunjukkan kemampuan instansi dalam merespon aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat terkait isu stunting. Responsibilitas berhubungan dengan kepatuhan terhadap

prosedur, regulasi, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan transparan.

Kerangka pemikiran ini juga memperhitungkan bahwa kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung bisa berupa regulasi yang jelas, sinergi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat dapat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan sanitasi lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai kinerja Dinas Kesehatan secara formal, tetapi juga mengkaji konteks pelaksanaan di lapangan secara lebih luas.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam menangani stunting, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas program dan pencapaian target nasional penurunan stunting.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika kinerja Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Bekasi. Fokus tidak hanya pada hasil akhir dari program, tetapi juga pada proses pelaksanaannya, konteks sosial-budaya, serta interaksi antar pelaku yang terlibat. Metode ini memungkinkan eksplorasi terhadap realitas di lapangan, termasuk persepsi, pengalaman, dan pandangan para pelaksana kebijakan maupun masyarakat penerima manfaat.

Sebagai alat analisis, digunakan teori kinerja organisasi publik yang dikembangkan oleh Agus Dwiyanto. Teori ini menekankan lima dimensi utama dalam menilai kinerja institusi sektor publik, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Masing-masing dimensi digunakan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan program stunting berjalan efektif,

sesuai aturan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan transparan. Kerangka ini memberikan dasar sistematis dalam mengurai kekuatan dan kelemahan lembaga pelaksana dari sisi fungsional dan struktural.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 19 orang informan yang dipilih secara purposive, dengan kriteria memiliki pengetahuan, keterlibatan langsung, atau pengalaman dalam program penanganan stunting. Informan berasal dari berbagai latar belakang, seperti pejabat dinas kesehatan, kepala puskesmas, petugas lapangan, dan tokoh masyarakat. Observasi langsung dilakukan untuk melihat praktik di lapangan, kondisi pelayanan, dan interaksi antar pihak. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti laporan kegiatan, kebijakan daerah, data stunting, dan panduan pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi digunakan untuk menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen, agar fokus terhadap isu yang diteliti tetap terjaga. Penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik untuk menunjukkan hubungan antar kategori dan pola-pola yang muncul dari lapangan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis informasi yang telah dianalisis secara mendalam, guna menggambarkan kondisi aktual kinerja organisasi serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya.

Melalui pendekatan ini, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan stunting dijalankan, sejauh mana kapasitas kelembagaan mendukung implementasi program, serta bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat berperan dalam menentukan keberhasilan intervensi di tingkat lokal. Kerangka metode ini juga memberikan ruang untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dan memberikan masukan bagi peningkatan kebijakan di masa mendatang.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam penanganan stunting tergolong cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Penilaian dilakukan berdasarkan lima dimensi kinerja organisasi publik menurut teori Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Pada dimensi kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, kinerja dinas menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Layanan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting, seperti pemeriksaan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, dan penyuluhan gizi, telah berjalan secara aktif di berbagai puskesmas. Responsivitas ditunjukkan oleh kemampuan dinas dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui program-program seperti pemberian makanan tambahan, edukasi tentang gizi, serta peningkatan kesadaran melalui kampanye dan kegiatan di tingkat desa. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari adanya pelaporan dan dokumentasi kegiatan yang transparan serta upaya evaluasi dan pelacakan terhadap capaian program secara berkala.

Namun, capaian dalam dimensi produktivitas dan responsibilitas masih belum optimal. Beberapa program penanganan stunting belum mencapai target yang ditetapkan, dan ada ketimpangan pelaksanaan antarwilayah, terutama antara wilayah yang mudah dijangkau dan wilayah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur. Produktivitas dinas juga terkendala oleh jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang terbatas, serta masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Pada aspek responsibilitas, terdapat permasalahan dalam konsistensi penerapan prosedur dan regulasi, baik di tingkat pelaksana lapangan maupun dalam koordinasi antarunit kerja.

Faktor pendukung kinerja dinas meliputi tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung, kewenangan institusi dalam pengambilan keputusan, serta adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai program nasional terkait stunting. Sinergi dengan lintas sektor, seperti dinas pendidikan, dinas sosial, serta lembaga non-pemerintah, juga

berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, keterlibatan kader kesehatan, perangkat desa, dan posyandu menjadi komponen penting dalam memperluas jangkauan edukasi dan layanan gizi.

Sebaliknya, faktor penghambat yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi yang belum mendukung, seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kurangnya akses terhadap air bersih. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pola asuh anak yang kurang tepat dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah menjalankan sejumlah upaya strategis, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan sekolah, meningkatkan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta menjalankan program intervensi gizi spesifik dan sensitif. Program seperti “Gerakan Aksi Bergizi” dan pembentukan kampung bebas stunting menjadi langkah nyata dalam mendorong penurunan prevalensi stunting. Selain itu, kerja sama dengan organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya juga terus ditingkatkan agar penanganan stunting dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat kekurangan, kinerja Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi stunting, dengan perbaikan yang terus dilakukan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam penanganan stunting dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal di semua aspek. Pada dimensi kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen yang tinggi melalui penyediaan layanan kesehatan dasar, penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta keterbukaan informasi kepada publik. Pelibatan lintas sektor, kader kesehatan, dan perangkat desa juga mendukung capaian positif di tiga dimensi tersebut. Masyarakat

mulai menunjukkan partisipasi dalam kegiatan pencegahan stunting, dan program intervensi seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, serta edukasi melalui posyandu telah berjalan di banyak wilayah.

Namun, pada dimensi produktivitas dan responsibilitas, kinerja masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa program belum mencapai target penurunan stunting secara konsisten di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan akses terbatas atau kondisi sosial ekonomi rendah. Implementasi program di lapangan juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar prosedur, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan konsistensi pelaksanaan. Selain itu, faktor eksternal seperti kemiskinan, sanitasi lingkungan yang buruk, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan yang cukup signifikan.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan telah berupaya menjalankan perannya secara aktif dalam menangani stunting melalui berbagai strategi dan program. Namun, keberhasilan yang lebih optimal masih membutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pelaksana, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Penurunan angka stunting di Kabupaten Bekasi tidak hanya bergantung pada intervensi gizi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat, perbaikan sanitasi, serta komitmen politik dan kebijakan yang mendukung upaya jangka panjang.

Saran

Pertama, perlu dilakukan penguatan pada aspek produktivitas dan responsibilitas melalui peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pemantauan yang lebih sistematis, berbasis data dan bukti, untuk memastikan bahwa target program tercapai secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Perlu juga dilakukan pelatihan secara berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting secara tepat.

Kedua, Dinas Kesehatan perlu memperluas jangkauan edukasi gizi dan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga balita. Edukasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait pola asuh, pola makan, kebersihan lingkungan, serta pentingnya pemanfaatan layanan kesehatan. Pendekatan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader kesehatan dan tokoh masyarakat lokal perlu dimaksimalkan untuk menjangkau komunitas-komunitas yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pencegahan stunting.

Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif dan terarah. Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi stunting, melainkan harus melibatkan dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk menciptakan intervensi yang bersifat menyeluruh (holistik). Contohnya, program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pendidikan kesehatan di sekolah harus diintegrasikan ke dalam satu sistem kerja yang saling mendukung.

Keempat, aspek pendanaan juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional dan berkelanjutan untuk program penanggulangan stunting, baik melalui APBD maupun melalui dukungan dana dari pemerintah pusat. Selain itu, perlu upaya untuk menggandeng sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk kemitraan sosial, sponsor kegiatan, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar sumber daya yang tersedia semakin luas dan beragam.

Kelima, perlu dilakukan penguatan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah, termasuk penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara spesifik mengatur strategi percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, arah yang jelas, serta mendorong komitmen lintas sektor agar bekerja secara sinergis dan berkesinambungan.

Terakhir, penting untuk membangun sistem penghargaan dan insentif bagi desa, kader, atau puskesmas yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Langkah ini dapat mendorong motivasi dan semangat kerja pelaksana di lapangan. Disarankan pula untuk membentuk forum komunikasi stunting di tingkat kecamatan atau desa, yang menjadi ruang koordinasi dan evaluasi berkala antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Dwiyanto et. Al., Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: PSKK UGM, 2006. Hlm.50-57
- A.S. Moenir. (2010). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara. Hlm. 26.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 67.
- Dr. Kasmir. (2015), Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.182
- H.Siswanto Sunarno, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1
- Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35
- Kementerian PPN/Bappenas. Kajian Sektor Kesehatan Pembangunan Gizi di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. 2019. 1-78 p
- Kobarsih M., Siswanto N. 2015. Penanganan Susut Panen Dan Pasca Panen Padi Kaitannya Dengan Anomali Iklim Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta. Hlm. 11.
- Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, hlm 13
- Lukman Santoso Az, 2105, Hukum pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 25.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.14
- Notoatmodjo S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd edn. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.83
- Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.
- Prastowo, Andi. (2015). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 195
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm. 99.
- Robbins, Stephen P. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Hlm. 260
- Ruslianti, dkk. Gizi dan Kesehatan Anak Pra-sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2015. Hlm 147.
- Sandu Siyoto, SKM., M. K., & M. Ali Sodik, M. . (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Cetakan 1, Vol. 7, Issue 2). Literasi Media. Hlm.1-109.
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 33
- Septiana P, dkk . Konsumsi Junk food dan Serat pada Remaja Putri Overweight dan Obesitas yang Indekos 2018;30(1):61-7
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Hlm. 144
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA).Hlm.401
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.Hlm.213
- Sutrisno Hady. (2009), Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama,

- Cetakan Ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. Hlm. 167.
- Tangkilisan, Nogi S., Hesel, 2005, "Strategi Keunggulan Pelayanan Publik: Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik (Konsep-Teori & Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Konsep Russel)", Kerjasama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta.
- Veithzal Rivai, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.311.
- Yeremias Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media, 2004, hlm. 193.
- Jurnal**
- Aditya Wardhana (2024). Teori Organisasi Di Era Digital (pp.270-283) Publisher: Eureka Media Aksara. Hlm. 270
- Aridiyah, F.O., N. Rohmawati., dan M. Ririanty. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas). E-jurnal Pustaka Kesehatan, 3 (1): 163-170.
- Authors. Andrew J Prendergast, Jean H Humphrey. The stunting syndrome in developing countries Epub 2014 Oct 13. PMID: 25310000. PMCID: PMC4232245. DOI: 10.1179/2046905514Y.0000000158
- Beal, T. et al. (2018) "A review of child stunting determinants in Indonesia," Maternal and Child Nutrition, 14(4), hal. 1-10. doi: 10.1111/mcn.12617
- Benyamin Hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013, Program PPS-UI, hlm.21
- Bhenyamin Hoessein, 2002, Kebijakan Desentralisasi, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3
- Department of Economic and Social Affairs, (2004), p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, Pengembangan Model Administrasi Publik, Fisip UI, 2009, hlm. 5.
- D. Pratama. 2019. Preliminary analysis of learners in developing student book oriented research based learning models using 3D pageflip professionals on science lessons junior high school.
- Dewi, I. A., & Adhi, K. T. (2016). Pengaruh Konsumsi Protein Dan Seng Serta Riwayat Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Balita Umur 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Nusa Penida III. Arc. Com. Health Vol. 3 No. 1 :ISSN: 2527-3620 , 36 – 46.
- Herdman & Kamitsuru, 2018, Nanda-I Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 2018-2020, Jakarta : EGC.
- Ibrahim IA, dan, Faramita R. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014. public Health Science. 2014;VI.
- Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1185. Issue 1. DOI: 10.1088/1742-6596/1185/1/012125. ISBN 1742-6588
- Kwami CS, Godfrey S, Gavilan H, Lakhanpaul M, Parikh P. Water, sanitation, and hygiene: Linkages with stunting in rural Ethiopia. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(20).
- Mawar, Sari, Dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang : Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR Magelang
- Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). Jurnal Kesehatan Komunitas 2 : 254-261
- Muthia, G., Edison, dan Yantri, E. (2019) Evaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting ditinjau dari intervensi gizi spesifik gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman. Jurnal Kesehatan Andalas. 8(4). h. 100-107,
- Nurarif A H dan Kusuma H 2016. Asuhan Keperawatan Praktis Berdasarkan Penerapan Diagnosa Nanda, NIC, NOC dalam Berbagai Kasus, Mediacion Publishing, Jogjakarta
- Riyadi, Slamet . 2011 Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa

- Timur. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vo113, No. 1, Maret 2011:40-45
- Rondinely dalam Edward Mugabi, Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations
- Ruslianti, dkk. Gizi dan Kesehatan Anak Pra-sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2015.
- Supariasa IDN Dkk. Penilaian Status Gizi. Jakarta: EGC; 2012.
- Suliyanto, 2010. Studi Kelayakan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tiwari et al. (2014) 'Determinants of Stunting and Severe Stunting among under-fives: Evidence from The 2011 Nepa Demographic and Health Survey. Nepal', BMC Pediatrics.
- Sulistyaningrum Werdi dan Hendry Cahyo, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita di Kota Surabaya, Jurnal Ilmiah, vol. 2, no. 3, hlm. 3
- Trihono et al. Pendek (Stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Solusinya. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2015).
- Uddin N, Hasan MR, Hossain MM, et al. In vitro α -amylase inhibitory activity and in vivo hypoglycemic effect of methanol extract of Citrus macroptera Montr. fruit. Asian Pac J Trop Biomed. 2014;4(6):473-479
- World Health Organization (WHO). 2014. WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). Global Tuberculosis Report 2019. Geneva: World Health Organization; 2019
- Peraturan**
- Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
- Bappenas, (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020- 2024, Kementrian PPN/Bappenas: Jakarta.
- Kemenkes RI. 2018. Profil Kesehatan 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.
- Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan.
- SK Menkes No.1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2017.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2015.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNICEF1997; IFPRI 2016; BAPPENAS 2018, Disesuaikan dengan konteks Indonesia.
- Internet**
- Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf – Diakses Agustus 2018.
- Nations U, Unicef F. Improving Child Nutrition The achievable imperative for global progress [Internet]. Plaza, New York; 2013. Available from: https://www.unicef.org/publications/index_68661.html